



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

PKAD



TAHUN
2025

LAPORAN KINERJA (LKj)

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH



**PEMERINTAH
KAB. TANAH LAUT**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814

Telepon/Faksimile (0512) 2425788

Laman <https://bpkad.tanahlautkab.go.id> Pos-el bpkad@tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 100.3.5.4/07/BPKAD/ 2026

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).
 - bahwa untuk melegalkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Kedua : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan terkait mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) : Perencanaan, Pengumpulan data, Pengukuran kinerja, Pemantauan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
 - b. Mengkoordinasikan secara bersama dalam rapat berkala Triwulan (3 bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 - c. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama
- Keempat : Agar seluruh personil Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2026

**KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT,**

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.SI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 NOMOR : 100.3.5.4/07/BPKAD/ 2026
 TANGGAL : 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025 PADA BPKAD
 KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang Akuntansi
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang Belanja dan Pembiayaan
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang Penatausahaan Aset
7	Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset	Koordinator Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kasubbag Keuangan	Anggota
10	Kasubbid Akuntansi Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
11	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
12	Kasubbid Kasubbid Inventarisasi	Anggota
13	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Anggota
17	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
18	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Bidang Belanja dan Pembiayaan	Anggota
19	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota
20	Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota

**KEPALA BPKAD
 KABUPATEN TANAH LAUT,**



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategi (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Tanah Laut, 28 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANAH LAUT,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut ini menginformasikan secara rinci Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. Selanjutnya diharapkan LKIP 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kab. Tanah Laut ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 28 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANAH LAUT



MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR ISI

COVER	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. CASCADING KINERJA.....	4
E. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	13
F. DUKUNGAN SDM, SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN	17
G. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA.....	27
H. SISTEMATIKA PENYAJIAN	29
BAB II.....	30
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	30
A. VISI RPJMD	30
B. MISI RPJMD.....	31
C. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH ..	32
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
E. PERJANJIAN KINERJA.....	35
BAB III.....	37
AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. AKUNTABILITAS KINERJA	38
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	107
BAB IV	120
PENUTUP	120
A. KESIMPULAN.....	120
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	120

.....	41
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025.....	44
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	45
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional	45



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	
Perangkat Daerah.....	14
Tabel 1.2 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025	17
Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasaran.....	19
Tabel 1.4 Program dan kegiatan	26
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	34
Tabel 2.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	
Perangkat Daerah.....	35
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	36
Tabel 2.5 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025.....	36
Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis	38
Tabel 3.2 Pengelompokan Capaian Kinerja	39
Tabel 3.3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja.....	40
Tabel 3.4 Tujuan dan indikator tujuan IV	41
Tabel 3.5 Tabel Pencapaian Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	41
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025.....	44
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	45
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional	45



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tabel 3.9 Realisasi Program Penunjang	106
Tabel 3.10 Efisiensi Sasaran Strategis 1	106
Tabel 3.11 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	110
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024	111
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	115



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta proses bisnis level 0-3	5
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi	6
Gambar 1.3 SDM Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18
Gambar 3.1 Perkembangan Opini LKPD Se-Kalimantan Selatan TA 2013-2024.....	52



Grafik 1.1 SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut..... 18

dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Berbasis Cloud;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. CASCADING KINERJA

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

A. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BPKAD	 <p>P.1 Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif</p>
P.1 Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif	 <p>P.1.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>
P.1.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	 <p>P.1.4.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>  <p>P.1.4.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah</p>
P.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	 <p>P.1.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>  <p>P.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>  <p>P.1.1.1.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>  <p>P.1.1.1.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>
P.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	 <p>P.1.2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah</p>  <p>P.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai fungsi penunjang bidang keuangan dan aset yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, yakni:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
 - 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
 - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
 - 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
 - a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran;
 - 3) administrasi umum dan kepegawaian
 - 4) ketatausahaan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas BPKAD;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BPKAD
 - 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BPKAD
 - 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
 - 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan
 - 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
 - 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan BPKAD;
 - 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala BPKAD tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Perencanaan merencanakan kerja dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan
4. Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
6. Bidang Belanja dan Pembiayaan
 - a. Bidang Belanja dan Pembiayaan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang belanja dan pembiayaan daerah.
 - b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan dan perumusan rencana kerja bidang belanja dan pembiayaan
 - 2) penyiapan bahan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumusan pelaksanaan kebijakan anggaran, belanja dan pembiayaan Daerah
 - 3) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan pembiayaan daerah
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7. Sub Bidang Anggaran

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait anggaran Daerah.
8. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan

Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perbendaharaan dan pembiayaan.

9. Bidang Akuntansi

a. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja bidang akuntansi
- 2) perumusan kebijakan di bidang akuntansi
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang akuntansi
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi;
- 5) pelaksanaan kebijakan akuntansi pendapatan, piutang, dan pengelolaan kas
- 6) pelaksanaan kebijakan akuntansi belanja dan beban
- 7) pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi
- 8) pengumpulan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

10. Sub Bidang Akuntansi pendapatan dan pengelolaan kas

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait akuntansi pendapatan dan pengelolaan kas.

11. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait akuntansi belanja dan beban

12. Bidang Penatausahaan Aset

- a. Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan aset.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi
 - 1) penyusunan rencana kerja bidang penatausahaan aset
 - 2) perumusan kebijakan di bidang penatausahaan aset
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penatausahaan aset
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan aset
 - 5) pelaksanaan kebijakan inventarisasi
 - 6) pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah
 - 7) pelaksanaan kebijakan penyusunan standar harga barang dan jasa
 - 8) pelaksanaan kebijakan penyusunan standar barang milik Daerah dan standar kebutuhan barang milik Daerah
 - 9) penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
 - 10) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan aset
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 12) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

13. Sub Bidang Inventarisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Sub Bidang Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait inventarisasi aset.

14. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan kebutuhan barang milik Daerah.

15. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

- a. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian aset.
- b. Untuk melaksanakan tugas bidang pemanfaatan dan pengendalian aset mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kerja bidang pemanfaatan dan pengendalian aset;
 - 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian aset;
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pemanfaatan dan pengendalian aset;
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan dan pengendalian aset;
 - 5) pelaksanaan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan aset;
 - 6) pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan aset;
 - 7) pelaksanaan kebijakan pemindahtanganan dan penghapusan;
 - 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian aset;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
16. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan
- Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah.
17. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
- Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Daerah.

E. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	Lemahnya penyusunan anggaran keuangan sesuai ketentuan	Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh digitalisasi dan transformasi sistem keuangan publik serta dorongan menuju standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.	Arah kebijakan menekankan pada efisiensi anggaran dan akuntabilitas keuangan, disertai dorongan peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, serta penguatan transparansi dalam pelaporan keuangan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.	Pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada penyesuaian kebijakan fiskal, implementasi standar pelayanan keuangan daerah, serta penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan lokal agar lebih adaptif dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah	Optimasi kinerja dalam proses Penganggaran pada penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Belanja Daerah sesuai ketentuan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu
Proses penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah yang berbasis regulasi	Kurangnya kualitas pelayanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan keuangan daerah				
Sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang berbasis prinsip akuntabilitas	Lemahnya pertanggungjawaban belanja dan penyusunan laporan	Integrasi pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan lingkungan hidup				

	keuangan sesuai ketentuan						
Tata kelola aset daerah yang optimal	Kurangnya pemberian layanan terkait pemusnahan, dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Pengelolaan aset daerah berbasis prinsip ekonomi sirkular	Pengelolaan aset pemerintah dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset publik, penerapan standarisasi dalam pengelolaan aset, pengembangan model optimalisasi aset berbasis kebutuhan daerah, serta dorongan reformasi kebijakan harga barang publik untuk meningkatkan efisiensi dan nilai manfaat aset	Pengelolaan aset daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi penggunaan aset, penguatan efektivitas pengawasan, dorongan efisiensi pemanfaatan aset negara, serta penyesuaian harga satuan barang daerah agar lebih transparan dan akuntabel.	Pengelolaan aset daerah difokuskan pada implementasi kebijakan pemanfaatan aset yang efektif, penerapan audit aset daerah, dorongan optimalisasi pemanfaatan aset, serta penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) yang sesuai kebutuhan lokal untuk mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan adaptif.	Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah dalam proses Perencanaan, Inventarisasi, Penatausahaan, penyusunan laporan BMD, Pemanfaatan dan Penggunaan BMD, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahantanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD.	
Sistem pengendalian aset daerah berbasis regulasi	Lemahnya pengendalian BMD sesuai ketentuan	Penerapan standar lingkungan dalam pengelolaan aset pemerintah					
Pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif	Kurangnya optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Pemanfaatan aset daerah untuk mendukung program pembangunan rendah karbon					
Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) berbasis regulasi	Belum optimalnya penyusunan SSH sesuai ketentuan	Penyusunan SSH yang berbasis prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya					
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Belum optimalnya penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Penyusunan RKBMD yang mempertimbangkan	Arah kebijakan mendorong sistem pengadaan berbasis	Pengelolaan keuangan dan aset didorong melalui	Pengelolaan aset daerah diarahkan pada penyusunan perencanaan	Implementasi sistem informasi pengelolaan	

berbasis perencanaan strategis		efisiensi energi dan dampak lingkungan	digital, penerapan digitalisasi pencatatan aset lancar, serta digitalisasi manajemen aset pemerintah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan aset publik.	reformasi pengadaan barang dan jasa, penerapan kebijakan transparansi dalam pencatatan aset, serta peningkatan efektivitas manajemen aset untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan akuntabel.	aset yang lebih adaptif, pelaksanaan reformasi pelaporan aset daerah, serta harmonisasi kebijakan aset daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan di Tingkat regional.	keuangan dan Aset yang terintegrasi
Pelaporan aset lancar yang transparan	Belum optimalnya pelaporan aset lancar berupa persediaan sesuai ketentuan	Pengelolaan persediaan barang yang lebih ramah lingkungan				
Manajemen Barang Milik Daerah (BMD) berbasis regulasi dan teknologi	Lemahnya inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Optimalisasi aset daerah untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan				



F. DUKUNGAN SDM, SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 64 orang yang terdiri dari 39 PNS, 13 PPPK penuh waktu dan 9 PPPK paruh waktu dan 3 Outsourcing Petugas Kebersihan Kantor dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Outsourcing	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
6	29	4	-	22	3	64	3	31	20	-	10	-	-	64

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai peta jabatan adalah 105 (seratus lima) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut masih berjumlah 64 (enam puluh satu) orang. Tidak terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh Kebijakan nasional terkait pembatasan formasi ASN serta pengetatan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyebabkan kebutuhan riil jabatan pada BPKAD belum dapat terpenuhi secara optimal di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendukung tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, akan tetapi Badan

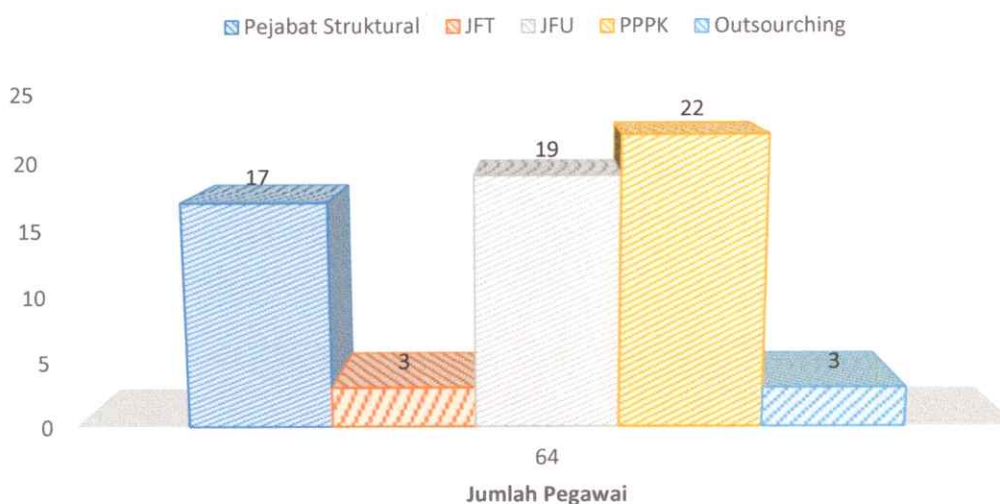


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tetap berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1
SDM Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

SDM BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT PER 31 DESEMBER 2025



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 17 Pejabat struktural, 3 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 19 orang fungsional umum (JFU), 22 orang PPPK dan 3 orang outsourcing dengan jumlah keseluruhan 61 pegawai ASN ditambah dengan 3 tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumber daya manusia, BPKAD Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.3
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah Barang		No	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah	58	Mesin Jilid	2	buah
2	A.C. Split	52	buah	59	Kichen Set	2	buah
3	Alat Dapur lainnya	1	buah	60	Mesin Pemotong Rumput	1	buah
4	Alat Kantor Lainnya	1	buah	61	Mesin Pengering Tangan	2	buah
5	Alat Pembersih lainnya	2	buah	62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah
6	Alat Pendingin lainnya	5	buah	63	Microphone/Wireless MIC	5	buah
7	Kursi Tunggu	7	buah	64	Monitor	1	buah
8	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	buah	65	Tabung Gas	2	buah
9	Bangku Tunggu	7	buah	66	P.C Unit	55	buah
10	Brandkas	4	buah	67	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	buah
11	Camera Electronic	2	buah	68	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	buah
12	CCTV - Camera Control Television System	14	buah	69	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	buah
13	Digital Multi Tester	1	buah	70	Pompa Air	2	buah
14	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	buah	71	Portable Compressor	1	buah
15	External/ Portable Hardisk	10	buah	72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	buah
16	Filing Cabinet Besi	33	buah	73	Rak Besi	178	buah
17	Genset	3	buah	74	Router	1	buah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

18	Gordyin/Kray	6	buah	75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20	buah
19	Lemari Es	2	buah	76	Scooter	7	buah
20	Hard Disk	2	buah	77	Sepeda Motor	17	buah
21	Hub	2	buah	78	Server	1	buah
22	Karpet	8	buah	79	Sofa	6	buah
23	Kipas Angin	2	buah	80	Sound System	2	buah
24	Kursi Besi/Metal	41	buah	81	Stabilisator	2	buah
25	Kursi Biasa	1	buah	82	Tangga	1	buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	83	Televisi	9	buah
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	84	Tong Air/ Tandon Air	2	buah
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah	85	Tool Kit Set	1	buah
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah	86	Uninterrupted Power Supply (UPS)	52	buah
30	Kursi Putar	78	buah	87	White Board	3	buah
31	Kursi Rapat	180	buah	88	Wireless Access Point	2	buah
32	Kursi Rapat Pejabat lainnya	3	buah	89	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	buah
33	Kursi Tamu	2	buah	90	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah
34	Lap Top	36	buah	91	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	buah
35	Layar Film/Projector	3	buah	92	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
36	Lemari Besi/Metal	20	buah	93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	buah
37	Lemari Kaca	1	buah	94	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	buah
38	Lemari Kayu	19	buah	95	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
39	Loudspeaker	5	buah	96	Pagar Permanen	1	buah
40	Meja Kerja Besi/Metal	18	buah	97	Selasar	1	buah
41	Besi/Metal			98	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	buah
42	Meja Kerja Kayu	75	buah	99	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	buah
43	Meja Komputer	2	buah				



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

44	Meja Rapat	67	buah	100	Jaringan listrik lainnya	3	buah
45	Meja Podium	1	buah	101	Pick Up	1	buah
46	Meja Tamu Biasa	4	buah				
47	Mesin Bor	1	buah	102	Saluran Pembuang Air	1	buah
48	Tangan Mesin	1	buah	103	Buangan Air Pertanian	1	buah
49	Gerinda	8	buah	104	Alat Stodio Lainnya	5	buah
50	Mic	1	buah	105	Acces Point	5	buah
51	conference	6	buah	106	Sepatu Lapangan	13	buah
52	Tiang	14	buah	107	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya permanen	1	buah
53	Bendera Dispenser						
54	Kursi Kerja	1	buah				
55	non struktural	1	buah				
56	Tripot Camera	3		108	Software	3	buah
57	Lensa Camera Layar Film/Projektor Camera Corferen	1		109	kajian	1	buah

Sumber data : Pengurus BMD BPKAD Kab. Tanah Laut

Dengan demikian sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung produk dan pelayanan pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Produk dan layanan yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berdasarkan dengan tugas pokok fungsi yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai berikut di bawah ini :

Produk dan Layanan pada Bidang Belanja dan Pembiayaan meliputi:

- 1) Penyusunan Penganggaran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- 2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 3) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
- 4) Penerbitan SKPP PNS Pensiun, Meninggal Dunia (Janda/Dudanya) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut)
- 5) Mutasi Gaji antar SKPD (Dalam Pemerintah Kabupaten Tanah laut)
- 6) Penggunaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat
- 7) Penggunaan BTT untuk Mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Produk dan Layanan pada Bidang Akuntansi meliputi;
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut.

- 1) Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan Triwulan SKPD dan SKPKD BPKAD Kab. Tanah Laut.
- 3) Pelaporan DAK Fisik Kab. Tanah Laut.
- 4) Pelaporan DAK Non Fisik Kab. Tanah Laut.
- 5) Pelaksanaan Koreksi dan Pengembalian Belanja Kab. Tanah laut.
- 6) Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja Modal (Aset) Bidang Akuntansi dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kab. Tanah laut.
- 7) Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan Kab. Tanah Laut
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kab. Tanah Laut Sub Bid Belanja dan Beban



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- 9) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat antara Kab. Tanah laut dengan KPPN dan KPP PRATAMA Banjar Baru.
- 10) Penyusunan Perda Perbub Pemerintah Daerah Kab. Tanah laut.
- 11) Pelaksanaan pengajuan User Simcloud BPKAD Kab. Tanah laut.
- 12) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang Kabupaten Tanah Laut.
- 13) Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 14) Pelaksanaan Koreksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut
- 15) Penyusunan LKPD Kabupaten Tanah Laut.Sub Bid Pendapatan dan Pengelolaan Kas
- 16) Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Daerah Kab. Tanah Laut.
- 17) Pelaksanaan Penyusunan Laporan Bulanan SIKD BPKAD Kab. Tanah Laut.

Produk dan Layanan pada Bidang Penatausahaan Aset meliputi :

- 1) Pembukuan Barang Milik Daerah
- 2) Pelaporan Barang Milik Daerah
- 3) Proses Inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah
- 4) Penatausahaan Barang Persediaan.
- 5) Pelaporan Barang Pakai habis.
- 6) Penyusunan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Berdasarkan Usulan SKPD
- 7) Penyusunan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- 8) Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Stándar Belanja (ASB) Bersifat Pekerjaan fisik.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

9) Penyampaian Usulan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Stándar Belanja (ASB) Bersifat Pekerjaan fisik. Berdasarkan Perubahan Usulan maupun Usulan Baru dari SKPD

10) Perubahan RKBMD

Produk dan Layanan pada Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset meliputi :

- 1) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 2) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan.
- 3) Proses Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 4) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penyertaan Modal
- 5) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Tukar Menukar.
- 6) Proses Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 7) Proses Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 8) Proses Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 9) Proses Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
- 10) Penggunaan Barang Milik Daerah Pengalihan Status Barang Milik Daerah
- 11) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
- 12) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerjasama pemanfaatan Infrastruktur (KPSI)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- 13) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa
- 14) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Pinjam Pakai
- 15) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- 16) Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
- 17) Pengamanan Administrasi Tanah Barang Milik Daerah
- 18) Pengamanan Hukum Tanah Barang Milik Daerah
- 19) Pengamanan Fisik Tanah Barang Milik Daerah
- 20) Pengamanan Fisik Gedung dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah
- 21) Pengamanan Administrasi dan Hukum Gedung dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah
- 22) Pengamanan Hukum Kendaraan Barang Milik Daerah
- 23) Pengamanan Fisik dan Administrasi Kendaraan Barang Milik Daerah
- 24) Pengamanan Rumah Tangga Barang Milik Daerah
- 25) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 26) Pembuatan Permohonan Surat Pengantar Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Melalui Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIM PKB).
- 27) Pembuatan permohonan izin penghunian rumah dinas bagi ASN yang ingin mendiami rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Sistem Informasi Rumah Dinas (SiRudi).



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tabel 1.4

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.080.889.298,48
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.863.555,80
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.911.368.241,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.698.867.917,68
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654.500.367,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.246.917,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.042.300,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	319.341.935.329,16
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	481.014.234,40
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	139.381.980,30
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	897.409.318,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	317.824.129.796,46
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.365.582.948,19
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.365.582.948,19
	JUMLAH	344.788.407.575,83



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

G. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 dari Inspektorat nomor 700.1.2.1/75/LHE AKIP/Insp/2025 tanggal 29 Agustus 2025 bahwa dimana BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan Nilai 83,90 atau dengan Predikat "A" (Memuaskan), namun masih terdapat rekomendasi pada 4 (empat) komponen untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
PERENCANAAN KINERJA						
1	Menyusun output dan outcome pada Rancangan Renstra 2025-2029, sehingga dapat digunakan sebagai target yang akan dicapai.	Akan menyusun output dan outcome pada Rancangan Renstra 2025-2029, sehingga dapat digunakan sebagai target yang akan dicapai.	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Kepala Badan	Dokumen RENSTRA 2025-2029 BPKD
2	Melakukan penyesuaian Matriks Peran Hasil pada aplikasi E-Kinerja dengan Perjanjian Kinerja yang terbaru, sehingga selaras indikator kinerjanya	Akan melakukan penyesuaian Matriks Peran Hasil pada aplikasi E Kinerja dengan Perjanjian Kinerja yang terbaru, sehingga selaras indikator kinerjanya dan akan berkesinambungan pada tahun berikutnya.	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Sekretaris	Matrix Peran Hasil e-Kinerja lingkup ASN BPKAD
PENGUKURAN KINERJA						
1	Melakukan pemantauan secara berjenjang, yaitu penilaian kinerja melalui SKP dan E Kinerja memuat narasi yang menjelaskan tentang hambatan dan penunjang yang dihadapi	Akan melakukan pemantauan secara berjenjang, yaitu penilaian kinerja melalui SKP dan E Kinerja memuat narasi yang menjelaskan tentang hambatan dan penunjang yang dihadapi merupakan hasil dari	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Sekretaris	Dokumen E-Kinerja lingkup ASN BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

	merupakan hasil dari pemantauan kinerja dari atasan kepada bawahan.					
PELAPORAN KINERJA						
1	Merancang upaya-upaya efisiensi beserta rincian perhitungannya, yaitu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin dengan penggunaan biaya atau sumber daya sekecil mungkin.	Akan merancang upaya-upaya efisiensi beserta rincian perhitungannya, yaitu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin dengan penggunaan biaya atau sumber daya sekecil mungkin.	1 Dokumen	Januari-Desember 2025	Kepala Badan	Dokumen Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL						
1	-	Akan menjadikan evaluasi kinerja internal secara berkala dan berjenjang sebagai bentuk pemantauan dan pengendalian dalam pencapaian target kinerja sehingga belum diketahui apa hambatan yang dihadapi dan penanganannya mulai dari atasan hingga bawahannya secara individu.	1 Dokumen	Januari-Desember 2025	Kepala Badan, Sekretaris	Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja



H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai penggerak tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan, guna menjamin tersedianya dukungan fiskal yang optimal bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan bertanggung jawab, serta pengelolaan aset daerah yang profesional dan bernilai tambah, sehingga mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut periode RPJMD 2025–2029

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. MISI RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

C. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel.

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	4 79.645	5 79.7	6 80	7 80.5	8 81	9 81.5	10 82
	1. Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : RENSTRA BPKAD Tahun 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.5.4/09.1/BPKAD/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nilai)	Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut tahun sebelumnya yang disampaikan pada Semester I tahun berkenaan

Sumber data : RENSTRA BPKAD Tahun 2025-2029

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tabel 2.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel	

Sumber data : RENSTRA BPKAD Tahun 2025-2029

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nilai)	WTP	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sumber data : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 344.788.407.575,83. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	319.341.935.329,16
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.365.582.948,19
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.080.889.298,48
JUMLAH			344.788.407.575,83

Sumber data : DPA BPKAD Tahun 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Sesuai dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.5.4/09.1/BPKAD/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nilai)	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :



Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100%
		Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100%
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	Realisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :



TUJUAN I PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih masa Renstra 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**” dan menetapkan tujuan ke: 4 yaitu **Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator dengan target yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai) pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	Nilai	79,7

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam masa tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan tujuan ke:1 **Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menjadi pengampu tujuan kepala daerah terpilih, dengan hasil yang sangat memuaskan dan telah terealisasi yang dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.5
Tabel Pencapaian Tujuan Strategis
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan Strategis	No	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
						Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	49,38(SPP)	61 (PB)	80,83 (BAIK)	132,51%	66 (PB)	79,645 (BAIK)	120,68%	79,7	89,104 (BAIK)	111,80%
			Rata-rata capaian kinerja		49,38(SPP)			132,51%			120,68%			111,80%

Sumber data : Hasil Pengukuran IPKD dari Kemendagri

Dapat dilihat pada tabel diatas target nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 didalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebesar 79,7. Bahwa telah ditetapkan/disampaikan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 sesuai surat pengantar dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tanggal 13 Desember 2024 perihal penyampaian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil IPKD Tahun Anggaran 2025 tahun ukur 2024 dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2025 mendapatkan Nilai Total 89,104 capaian realisasi sebesar 111,80% atau dengan peringkat **"BAIK"** dan dengan Nilai "A" ranking ke 10 dari 105 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi".

Hasil penilaian Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, 2024 dan 2025 rata-rata telah memperoleh Nilai BAIK (A), yaitu hasil Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Laut mendapat peringkat 4 untuk tahun 2022 tahun ukur 2023 dengan Nilai total 80,83 dengan Peringkat BAIK (A).

Sedangkan Hasil Pengukuran IPKD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2023 tahun ukur 2024 dengan Nilai total 79,645 dengan Peringkat BAIK (A), Selanjutnya Hasil Pengukuran IPKD tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2024 tahun ukur 2025 dengan Nilai total 89,104 dengan Peringkat BAIK (A), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menempati peringkat ke 2 di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten/Kota IPKD tertinggi.

Berikut dokumentasi atas diterimanya Penghargaan terbaik 2 IPKD tertinggi dan tinggi se-Kalimantan Selatan :





Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel

Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100%



Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	100 %	WTP	100 %

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Balangan	Banjarmasin	Provinsi	Nasional
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan pernyataan profesional yang didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur utama penilaian kewajaran laporan keuangan daerah. Berikut ini poin-poin unsur penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI :

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana seluruh transaksi keuangan telah dicatat, diukur, dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di lingkungan pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

2. Kelengkapan dan kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), yang tercermin dari penyajian seluruh komponen laporan keuangan daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat informasi penjabar secara memadai, informatif, dan dapat dipahami.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya pelanggaran yang bersifat material.
4. Kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dimana BPK-RI telah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat serta melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan.

Pemenuhan seluruh unsur tersebut mencerminkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sekaligus menunjukkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Bahwa Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dan telah terealisasi dengan capaian WTP dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis Akrual.
- Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015.

- Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk yang kesembilan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk yang kesepuluh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk yang kesebelas



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk yang ke-12 (dua belas) dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang disajikan dalam laporan Nomor : 8.B/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis BPKAD Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dengan indikator Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%, dan pada Tahun 2024 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk yang ke 12 (dua belas) kalinya, sehingga dengan demikian bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam tahun Renstra BPKAD 2013-2018, tahun Renstra 2018-2023, Tahun Renstra 2024-2026, dan Renstra 2025-2029 bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab telah berhasil dilaksanakan 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Berikut Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP Tahun 2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk yang ke-12 (dua belas) :





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Pada indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang ditargetkan 100% dalam dokumen Renstra, telah tercapai secara konsisten hingga tahun pelaporan. Pada Tahun 2024 dan 2025, capaian kinerja indikator Opini BPK masing-masing mencapai 100%, sejalan dengan target jangka menengah organisasi. Perolehan Opini WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut sejak Tahun 2014 hingga 2025 menegaskan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan BPKAD telah selaras dengan arah pembangunan daerah serta sepenuhnya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Pada perbandingan capaian WTP di Kabupaten Tanah Laut dengan capaian WTP di Kabupaten lainnya, Provinsi Kalimantan Selatan, serta capaian WTP secara Nasional di Kemendagri dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa capaian WTP secara Nasional di Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan Opini WTP 12 kali berturut turut sampai dengan tahun 2025, sedangkan capaian WTP di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Opini WTP 12 kali berturut turut sampai dengan tahun 2025, serta capaian Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan dan Banjarmasin telah mendapatkan opini WTP 12 kali berturut-turut juga, sama dengan Kabupaten Tanah Laut yang telah mendapatkan Opini WTP 12 kali berturut turut sampai dengan tahun 2025, sehingga dengan demikian capaian kinerja telah tercapai 100% dan sampai dengan tahun Renstra 2025 ditargetkan akan tercapai 100% atau akan mempertahankan Opini WTP sampai tahun Renstra pada tahun 2029. Hasil penilaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Selatan selama periode Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.1 Perkembangan Opini LKPD
Se-Kalimantan Selatan TA 2013-2024**

NO	ENTITAS	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
1	Provinsi Kalimantan Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Banjarmasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Kotabaru	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Tanah Bumbu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tanah Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Barito Kuala	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Tapin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Balangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Tabalong	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : BPK-RI

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah “Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel”, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melaksanakan :

a. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah

1. Pada pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember. Bahwa pada tahun 2025 penetapan APBD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 sehingga





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target Tahun RPJMD (2025) yaitu 100%. Dari sisi pelaksanaan anggaran, total pagu APBD Kabupaten Tahun 2025 sebesar Rp2.862.912.928.226,68, dengan total realisasi anggaran mencapai Rp2.589.100.987.055,96. Realisasi tersebut setara dengan 90,44 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Persentase realisasi anggaran yang tinggi tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan.

Kemudian dari sisi Pendapatan Daerah dari target Anggaran Tahun 2025 sejumlah Rp. 1.955.941.420.228,00 telah terealisasi sejumlah 2.334.181.552.452,68 atau dengan capaian 119,34 %. Dengan capaian ini, pendapatan daerah memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah secara optimal.

2. Pada tahun 2025 Perbendaharaan dan Pembiayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai BUD/PPKD melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan total ASN 6.118 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 4.125 orang dan PPPK sejumlah 1.993 orang.
 - b) Pelayanan SP2D baik GU/TU/LS telah menerbitkan sebanyak 9.727 dokumen SP2D.
 - c) Telah menerbitkan SKPP Pensiun untuk Tahun 2025 sebanyak 295 dokumen.
 - d) Telah melakukan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah kepada Pengelola Keuangan (Kasubbag. Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengelola Keuangan/PPK) pada 40 SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- e) Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perbendaharaan keuangan daerah, Kabupaten Tanah Laut telah menjalin Kerjasama dengan pihak antara lain :
1. BPJS
 2. BANK KALSEL CABANG PELAIHARI
 3. TASPEN
- f) Pada pelaksanaan penyaluran Anggaran Dana Desa ke Pemerintah Desa se-Kabupaten Tanah Laut sebanyak 130 Desa di lingkup Kabupaten Tanah Laut, telah terrealisasi 95,68 %

Foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026



Pembahasan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025





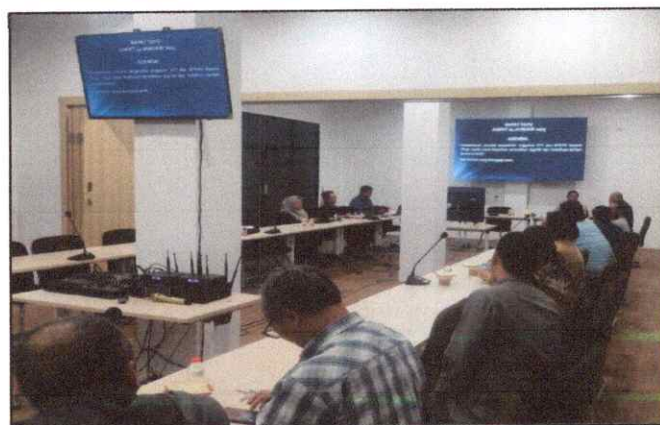
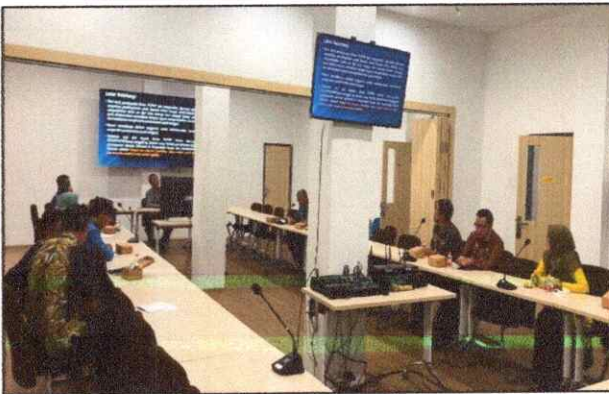
Pembahasan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pembahasan Rencana Pergeseran BTT dari BPKAD kepada Dinas Sosial





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kegiatan Rapat TAPD





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

b. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah

1) Pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) BPKAD melaksanakan rekonsiliasi belanja dan beban, belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pajak pusat kepada 40 SKPD sesuai ketentuan. Rekonsiliasi belanja dan beban dilaksanakan secara triwulanan, rekonsiliasi belanja modal dan DAK dilaksanakan sesuai jadwal, serta rekonsiliasi pajak pusat dilakukan secara berkala.
- b) BPKAD melaksanakan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran pada 40 SKPD terkait mekanisme akuntansi dan pelaporan keuangan melalui aplikasi SIPD RI, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- c) Pembinaan penyaluran DAK Fisik dan Nonfisik Tahun 2025 difokuskan pada 16 kegiatan/bidang penerima DAK. BPKAD telah melaksanakan pembinaan kepada SKPD pengelola DAK agar penyaluran dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
- d) BPKAD melaksanakan monitoring belanja dan beban kepada 40 SKPD melalui evaluasi laporan bulanan yang disampaikan dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan penyampaian laporan di bawah tanggal 10 bulan berikutnya.
- e) BPKAD menyusun dokumen laporan hasil rekonsiliasi keuangan sesuai ketentuan, meliputi Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja dan Beban per triwulan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal per triwulan, Laporan Hasil Rekonsiliasi DAK, serta Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Pusat per semester.
- f) BPKAD menyusun dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan DAK Fisik dan Nonfisik, laporan keuangan audited dan unaudited, laporan realisasi anggaran, laporan prognosis



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

APBD, serta laporan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan.

- g) BPKAD melaksanakan pembinaan kepada 40 SKPD terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) BPKAD memfasilitasi 40 SKPD dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.
- i) BPKAD menyusun dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited dan unaudited serta dokumen Raperda, Raperbup, Perda, dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) BPKAD melaksanakan kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diikuti oleh aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- k) BPKAD menyusun laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya, antara lain LKPD audited dan unaudited, laporan piutang daerah, investasi non permanen dan pendapatan, laporan koordinasi akuntansi penerimaan kas, laporan monitoring kas, serta laporan SIKD. Selain itu, dilaksanakan pembinaan Bendahara Penerimaan, rekonsiliasi kas Dana BOS per semester, rekonsiliasi kas daerah bulanan dengan Bank Kalsel, serta koordinasi penyaluran Dana Insentif Fiskal dan DAU Specific Grant.

Berikut adalah DAU Specific Grant yang telah disalurkan ke Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2025:

No	Uraian	Penyaluran Tahun 2025
1	DAU Kelurahan	Rp1.000.000.000,00
2	DAU Bidang Pendidikan	Rp31.591.763.000,00
3	DAU Bidang Kesehatan	Rp23.990.589.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Berikut adalah Dana Insentif Fiskal yang telah disalurkan ke Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2025:

No.	Uraian	Penyaluran Tahun 2025
1	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	Rp7.592.690.000,00

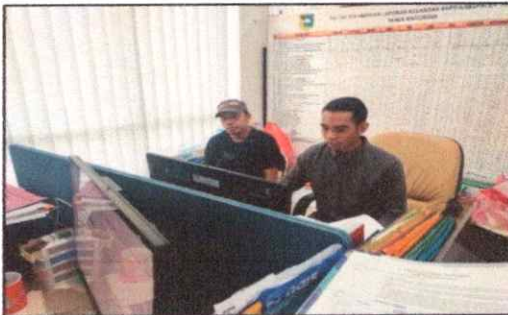
- l) BPKAD melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, meliputi fasilitasi rapat penyelesaian kerugian daerah, penyusunan laporan pembayaran kerugian daerah kepada BPK, pemutakhiran data, penyusunan SK pembebanan sementara, serta penerbitan surat penagihan kerugian daerah.
- m) BPKAD melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan BLUD yang meliputi laporan hasil rekonsiliasi kas BLUD, laporan monitoring kas daerah, serta laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan :

Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV TA 2024



Rekonsiliasi Keuangan Triwulan I TA 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Rekonsiliasi Keuangan Triwulan II TA 2025



Rekonsiliasi Keuangan Triwulan III TA 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

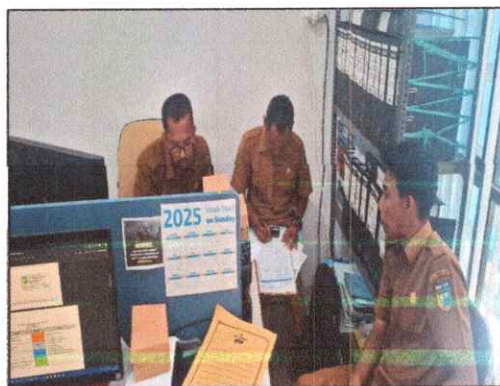
Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 2 TA 2024



Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester I TA 2025



Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Rekonsiliasi Belanja Modal Semester II TA 2024



Rekonsiliasi Belanja Modal Semester I TA 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Semester II TA 2024 pada



Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Semester I TA 2025 pada





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Triwulan III TA 2025



Melaksanakan Desk Realisasi bulan Maret 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Melaksanakan Desk Realisasi bulan April 2025



Melaksanakan Desk Realisasi bulan Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Melaksanakan Desk Realisasi bulan Juni 2025



Melaksanakan Desk Realisasi bulan Juli 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Melaksanakan Desk Realisasi bulan Agustus 2025



Melaksanakan Desk Realisasi bulan September 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Melaksanakan Desk Realisasi bulan Oktober 2025



Melaksanakan Desk Realisasi bulan November 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Melaksanakan Rekonsiliasi BOP PAUD dan Kesetaraan



Melaksanakan Pembinaan SKPD atas Laporan Keuangan terkait BOS, BOP, BLUD dan BOK





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



Melaksanakan penginputan saldo awal TA 2025 SIPD





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Melaksanakan Pembinaan SKPD atas Rekonsiliasi Pajak Pusat



KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TRIWULAN IV TAHUN 2025, TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**REKON KAS BLUD TRIWULAN IV TAHUN 2024, TRIWULAN I, II DAN
III TAHUN 2025**



REKONSILIASI KAS DAERAH DENGAN BANK KALSEL





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

RAPAT KOORDINASI DAN PENYAMAAN PERSEPSI PENERIMAAN KAS



**RAPAT SOSIALIASI EDARAN LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



c. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif

- 1) Pada pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dari target 16 laporan telah tersusun sebanyak 16 laporan atau telah terealisasi seluruhnya yaitu laporan Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Unaudit 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Audited 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Unaudit 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Audited 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Unaudit 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Audited 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Unaudit 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Audited 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Unaudit 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Audited 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) Unaudit 40 SKPD, Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) Audited 40 SKPD, Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Unaudit Tahun Anggaran 2024, Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Audited Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Anggaran 2024, Buku Induk Inventaris Kabupaten Intrakompabel per 31 Desember 2024, dan Buku Induk Inventaris Kabupaten Ekstrakompabel per 31 Desember 2024 yang menunjukkan bahwa proses pencatatan, pembukuan, dan pelaporan BMD telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.

- 2) Pada pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, penyusunan 1 laporan hasil inventarisasi juga telah tercapai sesuai target, mencerminkan terlaksananya pendataan dan verifikasi aset daerah secara optimal.
- 3) Pada pelaksanaan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah menunjukkan realisasi sebanyak 8 laporan yaitu Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 Semester II, Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 Semester I, Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 Semester II, Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 Semester I, Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV, Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 Triwulan I, Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 Triwulan II, dan Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 Triwulan III, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung tersedianya informasi BMD yang akurat dan tepat waktu.
- 4) Pada pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Bidang Penatausahaan Aset telah melaksanakan Sosialisasi dan Implementasi Pembukuan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi e-BMD agar tercapai pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis Digital sesuai amanat Permendagri no 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) dengan jumlah peserta pembinaan sebanyak 80 orang sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sudah dilaksanakan Pembinaan ke kecamatan dan SKPD sehingga capaian teralisasi 100%, yang menunjukkan terlaksananya upaya peningkatan kapasitas aparatur pengelola BMD secara efektif.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- 5) Pada pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi seluruhnya, dimana sebanyak 40 SKPD telah menyampaikan RKBMD hingga Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan kebutuhan barang pada seluruh SKPD telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.
- 6) Pada pelaksanaan penyusunan dokumen Buku Standar Satuan Harga dengan target 1 dokumen telah terealisasi melalui tersusunnya Buku Standar Satuan Harga Tahun 2026.
- 7) Pada pelaksanaan penyusunan Buku Standar Kebutuhan Barang, dimana 1 dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang Tahun 2026 telah diselesaikan sampai dengan Triwulan IV, sehingga mendukung keseragaman dan efisiensi dalam perencanaan kebutuhan barang daerah.
- 8) Pada pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi Barang Pakai Habis, seluruh 40 SKPD telah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan Barang Pakai Habis secara menyeluruh.
- 9) Pada pelaksanaan Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Peraturan Bupati Tanah Laut juga telah terealisasi sepenuhnya, dengan partisipasi 40 SKPD, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman SKPD terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan.
- 10) Pada pelaksanaan monitoring Barang Pakai Habis SKPD, telah dilaksanakan terhadap 40 SKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan monitoring telah berjalan optimal sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11) Pada pelaksanaan Rekonsiliasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan terhadap 40 SKPD pada Semester I dan Semester II Tahun 2025. Seluruh SKPD telah direkonsiliasi sesuai target yang ditetapkan.
- 12) Pada pelaksanaan Pemanfaatan dan Monitoring Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang telah dimanfaatkan dan dilakukan monitoring



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

selama Tahun 2025 sebanyak 116 BMD, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

- 13) Pada pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD telah dilaksanakan sebanyak 1 kali dan diikuti oleh 135 orang Kepala Desa se-Kabupaten Tanah Laut, guna meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah.
- 14) Pada pelaksanaan Pengajuan Lelang Barang Milik Daerah Sebanyak 65 BMD telah diajukan permohonan lelang ke KPKNL Banjarmasin. Sampai dengan akhir Desember 2025, seluruhnya masih dalam tahap verifikasi oleh Pejabat Lelang dan akan dilaksanakan pada awal tahun 2026.
- 15) Pada pelaksanaan Pemindahtanganan BMD melalui hibah telah dilaksanakan kepada pemerintah desa, instansi vertikal, pemerintah provinsi, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan, dengan jenis aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin, serta jalan, jaringan, dan irigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Pada pelaksanaan Pemusnahan BMD telah dilaksanakan terhadap aset yang berada dalam kondisi rusak berat, meliputi Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E), serta Sediaan Farmasi/Barang Persediaan, yang berasal dari berbagai SKPD.
- 17) Pada pelaksanaan Penghapusan BMD telah dilaksanakan terhadap aset yang telah dimusnahkan dan dipindahtangankan, guna menyesuaikan data aset pada sistem administrasi dan laporan keuangan daerah.
- 18) Penilaian BMD telah dilaksanakan sebagai dasar pemanfaatan dan pemindahtanganan, meliputi:
 - a) Penilaian 65 unit kendaraan dinas yang akan dilelang (61 unit roda 2, 3 unit roda 4, dan 1 unit roda 3);
 - b) Penilaian tanah kosong yang disewa oleh pihak lain;
 - c) Penilaian bangunan gudang dan kantin.
- 19) Pada pelaksanaan Penerimaan Hibah Masuk Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima hibah masuk berupa tanah,



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, yang telah dicatat sebagai Barang Milik Daerah dengan total nilai sebesar Rp4.113.611.500,00.

- 20) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan target pendapatan dari retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp463.155.003,00, dengan realisasi sebesar Rp466.921.603,00 atau mencapai 100,81 persen.
- 21) Pada pelaksanaan Rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan terhadap 40 SKPD pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dan seluruhnya terealisasi sesuai target.
- 22) Pada pelaksanaan Monitoring pengamanan dan pengawasan pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan terhadap aset daerah yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
- 23) Pada Pembinaan pengamanan tanah milik daerah telah dilaksanakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kepada 75 Sekretaris Desa, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran perangkat desa terhadap pengamanan aset daerah.
- 24) Pada Pengamanan hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah telah dilaksanakan melalui pengajuan 150 persil tanah untuk sertifikasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dengan hasil 144 persil tanah telah diterbitkan sertifikatnya sampai dengan akhir Tahun 2025.
- 25) Pada pelaksanaan Pengamanan fisik atas tanah milik daerah telah dilaksanakan melalui:
 - a) Pemasangan papan nama kepemilikan sebanyak 30 buah;
 - b) Pemasangan patok tanda batas tanah sebanyak 50 buah;pada lokasi aset daerah berupa tanah sekolah, rumah dinas, fasilitas umum, pasar, kawasan wisata, dan lahan milik pemerintah daerah.
- 26) Pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan terhadap:
 - a) 2 persil tanah;
 - b) 5 unit rumah dinas;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

- c) 1 unit gudang;
 - d) 10 unit kendaraan dinas bermotor;
yang tercatat pada Pengelola Barang/PPKD.
- 27) Pengadaan kendaraan dinas bermotor untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD telah dilaksanakan sebanyak 12 unit, terdiri dari:
- a). Mobil dinas jabatan;
 - b). Mobil dinas operasional;
 - c). Sepeda motor operasional lapangan;
- yang dialokasikan kepada Setda, Setwan, Diskominfo, DPRD, Satpol PP dan Damkar, KPU, BPN, serta TNI AU.

Foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan :

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah



Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah



Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Foto Sosialisasi PerBup tentang Standar Satuan Harga Tahun 2026



Foto Kendaraan Sewa



Buku Perbup SHS 2026





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Buku Standar Kebutuhan BMD TA 2026



Buku Perbup No.12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKBMD



RKBMD 2026



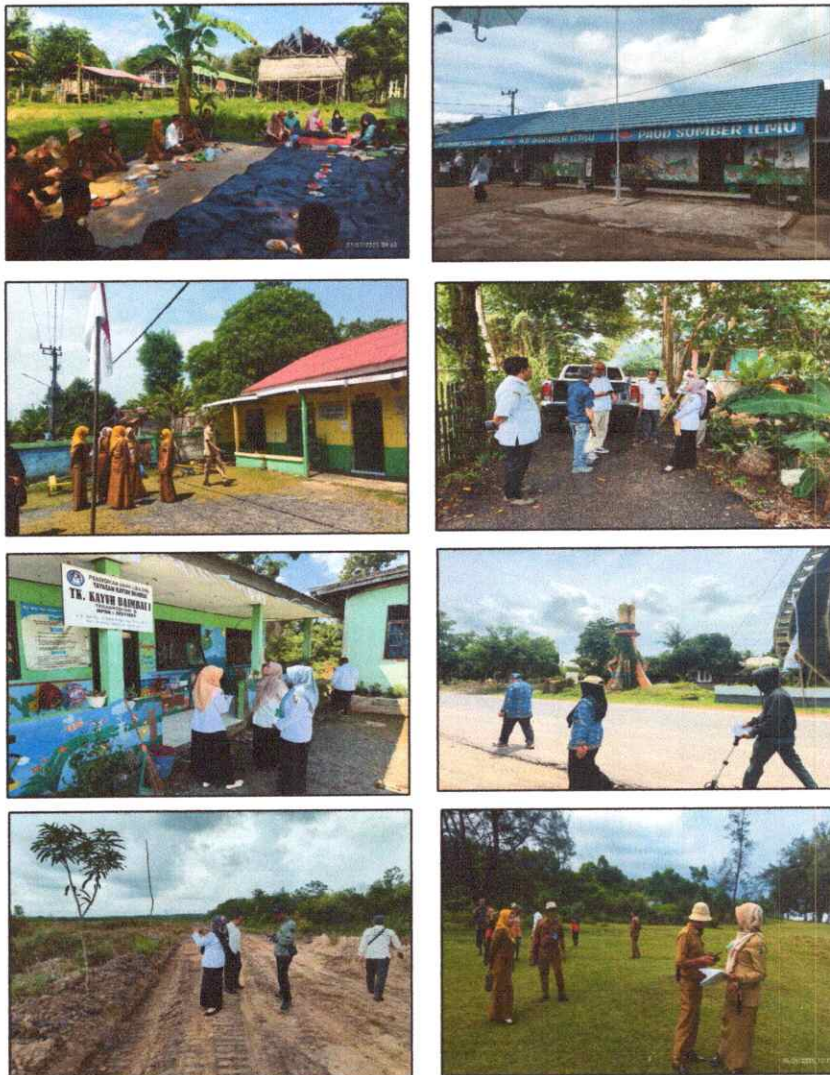


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Rekonsiliasi barang pakai habis



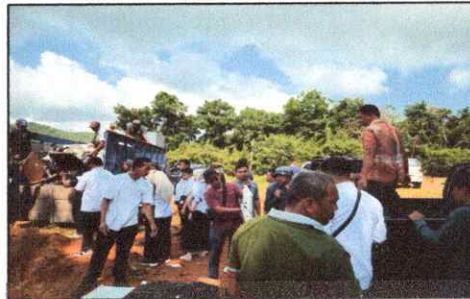
Kegiatan Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**Kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Tahun 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**Kegiatan Rekonsiliasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD
Tahun 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Tahun 2025**



Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD
Tahun 2025**



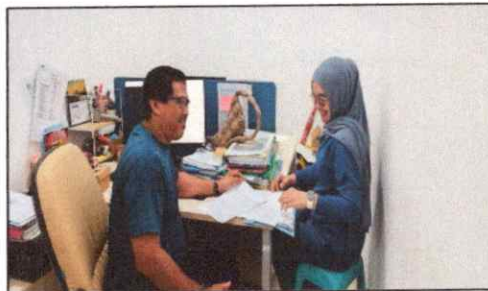


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**Kegiatan Monitoring Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
Tahun Anggaran 2025**



Kegiatan Rekonsiliasi Pengamanan dan Pemeliharaan BMD





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kegiatan Pemeliharaan BMD



**Kegiatan Pengamanan Fisik BMD
(Pemasangan Papan Nama dan Patok)**





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor



Rapat Koordinasi dan Fokus Group Discussion (FGD)





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Komitmen pimpinan dan jajaran BPKAD dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor pendorong utama dalam tercapainya indikator kinerja terkait kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Terwujudnya ketepatan waktu pengelolaan APBD

Koordinasi yang baik antara BPKAD, TAPD, DPRD, dan SKPD dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran mendorong tercapainya indikator ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen APBD serta dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengalaman dan kompetensi SDM BPKAD, didukung dengan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD, menjadi faktor pendorong tercapainya indikator kinerja terkait penyusunan laporan keuangan yang andal, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

4. Meningkatkan kepatuhan SKPD dalam pengelolaan keuangan

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring secara berkelanjutan kepada SKPD mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah, yang tercermin pada indikator kinerja kepatuhan administrasi dan ketepatan penyampaian laporan.

5. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah

Implementasi SIPD RI dan aplikasi pendukung lainnya menjadi faktor pendorong dalam mendukung indikator kinerja terkait keterpaduan data, tertib administrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

6. Meningkatkan tertib pengelolaan barang milik daerah

Tersedianya regulasi daerah serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BMD mendorong tercapainya indikator kinerja terkait penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan barang milik daerah.

7. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Komitmen BPKAD dalam mendorong pemanfaatan BMD yang bernilai ekonomis dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

8. Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Sinergi yang terbangun antara BPKAD dengan Inspektorat, KPKNL, perbankan daerah, dan instansi terkait lainnya mendukung pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu.

9. Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan

Komitmen BPKAD dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP dan BPK menjadi faktor pendorong tercapainya indikator kinerja terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

10. Meningkatnya kualitas pengendalian internal

Penerapan pengendalian internal secara konsisten dalam setiap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah mendukung pencapaian indikator kinerja terkait keandalan sistem pengelolaan keuangan daerah.

11. Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik menjadi faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja BPKAD, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

12. Meningkatnya komitmen aparatur pengelola keuangan

Kesadaran dan tanggung jawab aparatur pengelola keuangan dan aset di lingkungan SKPD dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan turut mendorong pencapaian indikator kinerja utama BPKAD secara keseluruhan.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025, kami menyadari bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

Sebagian penerima hibah dan bantuan sosial, termasuk sekolah swasta, belum memahami hak dan kewajiban sehingga berdampak pada kelengkapan dan ketepatan laporan pertanggungjawaban.

1. Sebagian penerima hibah dan bantuan sosial, termasuk sekolah swasta, belum memahami hak dan kewajiban sehingga berdampak pada kelengkapan dan ketepatan laporan pertanggungjawaban
2. Rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

3. Pembahasan KUA-PPAS dan Rancangan APBD cenderung diselesaikan mendekati batas waktu yang ditetapkan.
4. Keterbatasan SDM pada Subbidang Akuntansi Belanja dan Beban.
5. Mutasi bendahara pengeluaran SKPD memerlukan penyesuaian ulang administrasi keuangan.
6. Gangguan teknis pada aplikasi SIPD RI dalam penarikan data laporan.
7. Masih terdapat SKPD yang belum menyampaikan laporan secara tepat waktu.
8. Keterbatasan SDM pada Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan aset.
9. Jumlah aset daerah yang besar dan tersebar di 11 kecamatan.
10. Kurangnya kerja sama sebagian SKPD dalam penunjukan batas tanah aset daerah.
11. Adanya tekanan atau ancaman dari pihak ketiga dalam proses pengamanan aset.
12. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melengkapi dokumen pengamanan aset.
13. Pemanfaatan barang milik daerah belum optimal.
14. Masih terdapat pemanfaatan BMD yang tidak sesuai ketentuan.
15. Ketergantungan pada KPKNL dalam penilaian BMD karena belum tersedianya SDM penilai internal.
16. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada belum optimalnya serapan anggaran.
17. Keterlambatan penyampaian laporan BMD oleh pengurus barang SKPD.
18. Kesulitan survei harga dalam penyusunan Standar Satuan Harga.
19. Perubahan aplikasi SIMDA BMD ke E-BMD memerlukan adaptasi pengguna.
20. Pengurus barang merangkap tugas lain sehingga pengelolaan BMD belum optimal.
21. Informasi spesifikasi pengadaan BMD belum diterima tepat waktu oleh pengurus barang.
22. Data realisasi pengadaan BMD belum optimal.
23. Proses pencairan SP2D masih menunggu rekening koran bank.
24. Proses koreksi data SIPD RI harus melalui Pusdatin Kemendagri dan tidak selalu cepat.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan terhadap pencapaian kinerja, kami telah dan akan melakukan berbagai upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada penerima hibah dan bantuan sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

2. Melaksanakan pembinaan teknis penggunaan Siskeudes dan pelaporan desa secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan koordinasi dan pengaturan waktu pembahasan KUA-PPAS dan APBD.
4. Mengusulkan penambahan SDM dan mengoptimalkan SDM yang tersedia.
5. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran SKPD.
6. Melakukan pendampingan teknis dan koordinasi terkait kendala SIPD RI.
7. Meningkatkan intensitas komunikasi untuk percepatan penyampaian laporan SKPD.
8. Mengusulkan penguatan SDM pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan perencanaan pengamanan aset sesuai sebaran wilayah.
10. Memperkuat koordinasi dengan SKPD dalam penertiban batas aset daerah.
11. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dukungan pengamanan aset.
12. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengamanan aset.
13. Mendorong optimalisasi pemanfaatan BMD.
14. Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan BMD sesuai ketentuan.
15. Meningkatkan koordinasi dengan KPKNL serta mengusulkan diklat SDM penilai BMD.
16. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
17. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pengurus barang SKPD.
18. Memperkuat koordinasi survei harga dalam penyusunan SSH.
19. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi E-BMD.
20. Mengusulkan penguatan peran pengurus barang agar tidak bersifat rangkap tugas.
21. Mendorong percepatan penyampaian data spesifikasi pengadaan BMD.
22. Meningkatkan kualitas dan ketepatan data realisasi pengadaan BMD.
23. Meningkatkan koordinasi dengan pihak perbankan terkait data pencairan SP2D.
24. Melakukan konsultasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan SIPD RI.

Adapun dalam rangka peningkatan kinerja Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut membuat strategi dengan mengeluarkan inovasi SKPD pada tahun 2025 untuk membantu peningkatan pelayanan yaitu sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

1. Aplikasi SIMPKB (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor) sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2021 tentang Aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIM PKB) sebagai inovasi pelayanan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, inovasi ini dikeluarkan dengan latar belakang adanya keterlambatan dan kesalahan SKPD pada saat pengajuan permohonan memperpanjang masa pajak kendaraan dinas operasional, sehingga dengan adanya Aplikasi ini membantu mempercepat proses serta dalam hal koordinasi karena telah diinput oleh masing-masing SKPD sehingga kemungkinan keterlambatan dan kesalahan akan sangat kecil.



SIMPKB
Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor

Masuk ke akun Anda

Username atau email*

Kata sandi*

Captcha*

Sukses!

Ingat saya

Masuk

2. Sistem Informasi Inventarisasi Data Aset (SIFINDA) sesuai Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah melalui Aplikasi pada Bidang Penatausahaan Aset, inovasi ini dikeluarkan atas latar belakang Inventarisasi BMD dilakukan secara manual (kertas kerja) sehingga ada keterlambatan mengetahui jenis BMD dan tidak semua orang mengetahui kode barang selain Pengurus Barang, Dengan adanya Aplikasi SIFINDA ini mempermudah, mempercepat pelaksanaan Inventarisasi BMD tepat guna dan efektif dalam prosesnya dan untuk meningkatkan kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SiFINDA

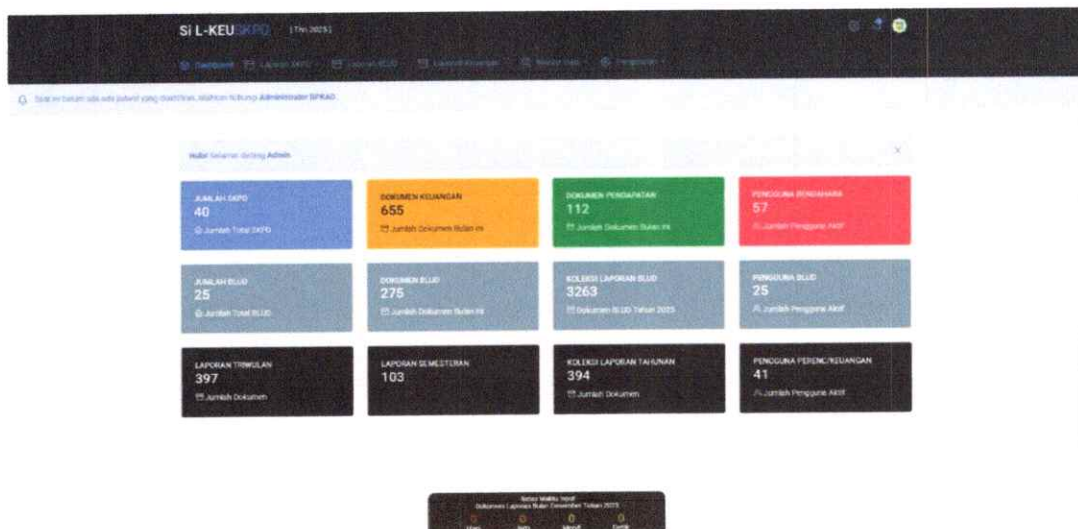
User Login

Username

Password

Login

3. Sistem Informasi Laporan Keuangan (SILKEU) sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Secara Elektronik pada Bidang Akuntansi, inovasi ini dikeluarkan karena selama ini Laporan Keuangan SKPD disampaikan melalui email tidak diketahui sudah apa belum SKPD menyampaikan dan hanya di ceklist satu persatu serta tidak diketahui tanggal masuk penyampaiannya, Aplikasi SILKEU Laporan Keuangan SKPD lebih tertib secara otomatis dan dapat diketahui SKPD yang menyampaikan tepat waktu dan secara lengkap, Aplikasi SILKEU membatasi waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya, sehingga apabila SKPD melebihi batas waktu penyampaian akan diberikan surat teguran keterlambatan, kecuali SKPD membuat Surat Permohonan.



4. Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD Lingkup Pemkab Tanah Laut sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pembayaran Gaji Dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya pada Bidang Belanja dan Pembiayaan, inovasi ini dikeluarkan karena selama ini tanggal gajian apabila tanggal 1 bertepatan tanggal merah atau liburan maka gajian bisa sampai tanggal 2, 3, 4 bahkan tanggal 5, sehingga dengan dikeluarkannya Perbup tentang ini maka sekarang walaupun tanggal 1 bertepatan liburan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetap dapat melakukan pembayaran Gaji bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Pimpinan dan Anggota DPRD. Sehingga dengan adanya inovasi-inovasi yang dibuat setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja di Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi di bidang Pelayanan Publik.



5. Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset (SIREKA) sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2024 Inovasi ini dibentuk dalam rangka melaksanakan upaya optimalisasi pelayanan dengan terobosan dan kemudahan bagi pengelola keuangan dan aset untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset secara cepat dan tepat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



🏠 Beranda

🛠️ Bantuan

6. Sistem Informasi Permohonan Surat Izin Rumah Dinas (SIRUDI) merupakan aplikasi untuk memfasilitasi permohonan, verifikasi, dan pengelolaan rumah dinas secara digital bagi ASN yang ingin mendiami rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

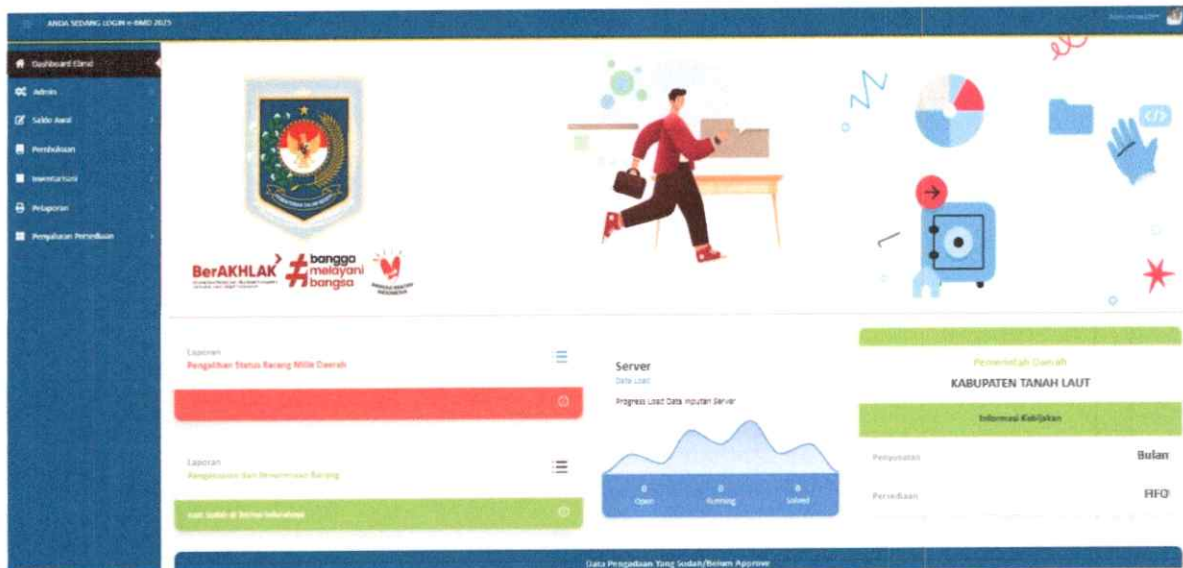


7. SIPD E-BMD merupakan aplikasi pengelolaan BMD berbasis elektronik yang mencakup seluruh siklus pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, hingga penatausahaan dan pelaporan. Penerapan E-BMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi BMD secara real time, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendukung penyusunan laporan aset yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, E-BMD juga menjadi instrumen pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, implementasi E-BMD merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



Dalam mencapai sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel didukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 61 ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta didukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 344.538.407.575,83 dan terealisasi Rp. 310.825.864.648,00 atau sebesar 90,22%



Tabel 3.9
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	319.341.935.329,16	288.367.843.210,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.365.582.948,19	10.646.862.039,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.080.889.298,48	11.811.159.399,00
JUMLAH		344.538.407.575,83	310.825.864.648,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(344.538.407.575,83 \times 100\%) - 310.825.864.648,00}{(344.538.407.575,83 \times 100\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 9,78%

Tabel 3.10
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	90,22%	9,78%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD tercermin melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan, dengan uraian sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, pagu pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.955.941.420.228,00. Sampai dengan akhir Desember 2025 (Triwulan IV), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.334.181.552.452,69, atau 119,34% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang sangat optimal.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pagu PAD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp39.221.873.641,00. Realisasi PAD hingga akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp54.358.068.677,69, atau 138,59% dari target. Tingginya capaian ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD serta optimalisasi potensi pendapatan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.828.344.394.508,00. Realisasi sampai dengan akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.152.701.636.576,00, atau 117,74% dari target, yang menunjukkan kelancaran penyaluran transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.

2. Belanja Daerah

Pagu belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp344.538.407.575,83. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja daerah mencapai Rp310.825.864.648,00, atau 90,22%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

dari pagu anggaran. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan belanja yang efisien dan terkendali.

Realisasi belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada Tahun Anggaran 2025, belanja operasi dianggarkan sebesar Rp20.968.940.912,37 dan terealisasi sebesar Rp18.205.104.285,00 atau 86,82%, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp8.914.756.042,00 atau 90,00% dari anggaran.
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.290.348.243,00 atau 83,98% dari anggaran.

b. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp5.995.336.867,00 dan terealisasi sebesar Rp5.469.963.748,00 atau 91,24%, yang digunakan untuk pengadaan aset daerah guna menunjang pelayanan dan kinerja perangkat daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.469.737.235,46, namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak direalisasikan (0,00%), karena tidak terdapat kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp300.104.392.561,00 dan terealisasi sebesar Rp287.150.796.615,00 atau 95,68%, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp10.351.405.997,00 atau 100,00%.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp276.799.390.618,00 atau 95,53%.

3. Pembiayaan dan SILPA

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp2.023.355.687.804,69, yang dikelola melalui mekanisme



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

pembiayaan daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp815.725.660.105,52, yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp805.725.660.105,52 serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp10.000.000.000,00.

Sementara itu, realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 digunakan untuk penyertaan modal daerah, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp765.725.660.105,52.

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari surplus anggaran dan pembiayaan netto, sehingga SiLPA per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.789.081.347.910,21.

Capaian tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien, serta menunjukkan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.



TUJUAN IV
Tabel 3.11
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Program		Persentase		
						Anggaran Rp	Realisasi Rp		se %	
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	319.341.935.329,16	288.367.843.210,00	90,29		
						12.365.582.948,19	10.646.862.039,00	86,10		
						13.080.889.298,48	11.811.159.399,00	90,22		
						344.538.407.575,83	310.825.864.648,00	90,22		
					2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
					3 Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Jumlah					



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025 5 = (4 / 3) *	REALISASI 2024
1	2	3	4	100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	119,34	2.410.973.884.147,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	138,59	74.270.607.892,24
4.1.02	Retribusi Daerah	463.155.003,00	466.921.603,00	100,81	204.428.774,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	100,00	14.726.892.282,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.474.046.698,00	40.606.475.134,69	159,40	59.339.286.836,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	138,59	74.270.607.892,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	117,74	2.336.582.620.253,91
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.693.607.614.100,00	1.998.442.037.425,00	118,00	2.143.201.377.810,91
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,49	193.381.242.443,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,49	193.381.242.443,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	117,74	2.336.582.620.253,91



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	143,84	120.656.001,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.720.126,00	97.956.735,00	1.268,85	95.099.752,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.367.431.953,00	127.023.890.464,00	143,75	25.556.249,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	143,84	120.656.001,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	119,34	2.410.973.884.147,15
5	BELANJA DAERAH	344.538.407.575,83	310.825.864.648,00	90,22	298.950.551.525,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.968.940.912,37	18.205.104.285,00	86,82	18.804.565.113,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.905.768.374,00	8.914.756.042,00	90,00	8.265.430.525,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.063.172.538,37	9.290.348.243,00	83,98	10.539.134.588,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.968.940.912,37	18.205.104.285,00	86,82	18.804.565.113,00
5.2	BELANJA MODAL	5.995.336.867,00	5.469.963.748,00	91,24	9.185.037.400,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	5.113.400,00	2,05	882.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.278.676.867,00	5.026.738.348,00	95,23	8.671.741.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	441.660.000,00	414.112.000,00	93,76	489.914.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00	22.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.995.336.867,00	5.469.963.748,00	91,24	9.185.037.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

5.4	BELANJA TRANSFER		300.104.392.561,00	287.150.796.615,00		95,68	270.073.187.012,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		10.351.405.997,00	10.351.405.997,00		100,00	6.071.025.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		289.752.986.564,00	276.799.390.618,00		95,53	264.002.161.912,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		300.104.392.561,00	287.150.796.615,00		95,68	270.073.187.012,00
	JUMLAH BELANJA		344.538.407.575,83	310.825.864.648,00		90,22	298.950.551.525,00
	SURPLUS/DEFISIT		1.611.403.012.652,17	2.023.355.687.804,69		125,56	2.112.023.332.622,15
6	PEMBIAHYAAN DAERAH		765.725.660.105,52	765.725.660.105,52		100,00	865.186.610.237,06
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		815.725.660.105,52	815.725.660.105,52		100,00	865.186.610.237,06
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		805.725.660.105,52	805.725.660.105,52		100,00	864.623.610.237,06
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		100,00	563.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		815.725.660.105,52	815.725.660.105,52		100,00	865.186.610.237,06
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		100,00	0,00
	PEMBIAHYAAN NETTO		765.725.660.105,52	765.725.660.105,52		100,00	865.186.610.237,06
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		2.377.128.672.757,69	2.789.081.347.910,21		117,33	2.977.209.942.859,21
4	PENDAPATAN DAERAH		1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69		119,34	2.410.973.884.147,15



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	138,59	74.270.607.892,24
4.1.02	Retribusi Daerah	463.155.003,00	466.921.603,00	100,81	204.428.774,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	100,00	14.726.892.282,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.474.046.698,00	40.606.475.134,69	159,40	59.339.286.836,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	138,59	74.270.607.892,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	117,74	2.336.582.620.253,91
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.693.607.614.100,00	1.998.442.037.425,00	118,00	2.143.201.377.810,91
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,49	193.381.242.443,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,49	193.381.242.443,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	117,74	2.336.582.620.253,91
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	143,84	120.656.001,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.720.126,00	97.956.735,00	1.268,85	95.099.752,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.367.431.953,00	127.023.890.464,00	143,75	25.556.249,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	143,84	120.656.001,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	119,34	2.410.973.884.147,15
5	BELANJA DAERAH	344.538.407.575,83	310.825.864.648,00	90,22	298.950.551.525,00

Sumber : BPKAD Kab. Tanah Laut

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	2.410.973.884.147,15	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	74.270.607.892,24	-
4.1.02	Retribusi Daerah	463.155.003,00	466.921.603,00	204.428.774,00	0,27
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	14.726.892.282,00	1,28
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.474.046.698,00	40.606.475.134,69	59.339.286.836,24	0,32
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	74.270.607.892,24	0,27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	2.336.582.620.253,91	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.693.607.614.100,00	1.998.442.037.425,00	2.143.201.377.810,91	0,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	193.381.242.443,00	0,20
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	193.381.242.443,00	0,20



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394,508,00	2.152.701.636,576,00	2.336.582.620,253,91	-	0,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	120.656.001,00		1.052,59
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.720.126,00	97.956.735,00	95.099.752,00		0,03
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.367.431.953,00	127.023.890.464,00	25.556.249,00		4.969,37
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	120.656.001,00		1.052,59
	JUMLAH PENDAPATAN	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	2.410.973.884.147,15	-	0,03
5	BELANJA DAERAH	344.538.407.575,83	310.825.864.648,00	298.950.551.525,00		0,04
5.1	BELANJA OPERASI	20.968.940.912,37	18.205.104.285,00	18.804.565.113,00	-	0,03
5.1.01	Belanja Pegawai	9.905.768.374,00	8.914.756.042,00	8.265.430.525,00		0,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.063.172.538,37	9.290.348.243,00	10.539.134.588,00		-
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.968.940.912,37	18.205.104.285,00	18.804.565.113,00	-	0,12
5.2	BELANJA MODAL	5.995.336.867,00	5.469.963.748,00	9.185.037.400,00	-	0,40
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	5.113.400,00	882.000,00		4,80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.278.676.867,00	5.026.738.348,00	8.671.741.000,00	-	0,42



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	441.660.000,00	414.112.000,00	489.914.400,00		0,15
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.000.000,00	22.500.000,00		0,07
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.995.336.867,00	5.469.963.748,00	9.185.037.400,00	-	0,40
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	887.762.000,00		-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	887.762.000,00		-
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	887.762.000,00		-
5.4	BELANJA TRANSFER	300.104.392.561,00	287.150.796.615,00	270.073.187.012,00		0,06
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.351.405.997,00	10.351.405.997,00	6.071.025.100,00		0,71
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	289.752.986.564,00	276.799.390.618,00	264.002.161.912,00		0,05
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	300.104.392.561,00	287.150.796.615,00	270.073.187.012,00		0,06
	JUMLAH BELANJA	344.538.407.575,83	310.825.864.648,00	298.950.551.525,00		0,04
	SURPLUS/DEFISIT	1.611.403.012.652,17	2.023.355.687.804,69	2.112.023.332.622,15	-	0,04
6	PEMBIAHYAAN DAERAH	765.725.660.105,52	765.725.660.105,52	865.186.610.237,06		-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	815.725.660.105,52	815.725.660.105,52	865.186.610.237,06	-	0,06



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	805.725.660.105,52	805.725.660.105,52	864.623.610.237,06	-	0,07
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	563.000.000,00		16,76
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	815.725.660.105,52	815.725.660.105,52	865.186.610.237,06	-	0,06
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00			-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		0,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	765.725.660.105,52	765.725.660.105,52	865.186.610.237,06		0,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.377.128.672.757,69	2.789.081.347.910,21	2.977.209.942.859,21	-	0,06
4	PENDAPATAN DAERAH	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	2.410.973.884.147,15	-	0,03
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	74.270.607.892,24	-	0,27
4.1.02	Retribusi Daerah	463.155.003,00	466.921.603,00	204.428.774,00		1,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	14.726.892.282,00		0,10
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.474.046.698,00	40.606.475.134,69	59.339.286.836,24	-	0,32



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.221.873.641,00	54.358.068.677,69	74.270.607.892,24	-	0,27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	2.336.582.620.253,91	-	0,08
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.693.607.614.100,00	1.998.442.037.425,00	2.143.201.377.810,91	-	0,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	193.381.242.443,00	-	0,20
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	193.381.242.443,00	-	0,20
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.152.701.636.576,00	2.336.582.620.253,91	-	0,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	120.656.001,00	1.052,59	1.052,59
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.720.126,00	97.956.735,00	95.099.752,00	0,03	0,03
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.367.431.953,00	127.023.890.464,00	25.556.249,00	4.969,37	4.969,37
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	120.656.001,00	1.052,59	1.052,59
	JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH	1.955.941.420.228,00	2.334.181.552.452,69	2.410.973.884.147,15	-	0,03
5	BELANJA DAERAH	344.538.407.575,83	310.825.864.648,00	298.950.551.525,00	0,04	0,04

Sumber : BPKAD Kab. Tanah Laut



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk E-BMD, guna meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, dan keterpaduan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan sosialisasi secara berkelanjutan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui rekonsiliasi secara berkala, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengawasan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

5. Mendorong tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang potensial serta meningkatkan pengamanan hukum dan fisik Barang Milik Daerah untuk mendukung pendapatan daerah dan mencegah permasalahan aset.

Pelaihari, 28 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANAH LAUT,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002

LAMPIRAN

**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025**

No	Penanggung Jawab	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	2025			Keterangan
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Kepala BPKAD	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini WTP	Opini WTP	100	
2	Sekretaris	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	82,90%	83,90%	101	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100	
2	Kabid Belanja dan Pembiayaan	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Persentase Penetapan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100	
			Persentase Realisasi APBD yang Tepat Waktu	91,38%	90,44%	99	
		Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran OPD	Persentase Dokumen penganggaran OPD tepat waktu	100%	100%	100	
		Meningkatnya sistem pengendalian ketersediaan kas daerah	Persentase dokumen penerimaan dan pengajuan pengeluaran kas yang diverifikasi sesuai SOP	100%	100%	100	
			Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	100%	100%	100	
		Meningkatnya sistem pengendalian ketersediaan kas daerah	Persentase dokumen penerimaan dan pengajuan pengeluaran kas yang diverifikasi sesuai SOP	100%	100%	100	
3	Kabid Akuntansi	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Persentase LKPD yang disampaikan sesuai SAP	100%	100%	100	
		Meningkatnya kepatuhan penyampaian laporan keuangan OPD	Jumlah OPD yang laporan keuangannya disampaikan tepat waktu	100%	100%	100	
4	Kabid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif	Persentase BMD yang dimanfaatkan	78%	78%	100	
			Jumlah temuan hasil pengawasan pengelolaan BMD yang di TL	100%	100%	100	
5	Kabid Penatausahaan Aset	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif	Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif/sesuai ketentuan	100%	100%	100	
		Meningkatnya kepatuhan OPD dalam menggunakan BMD	Persentase OPD yang memiliki pemetaan BMD sesuai standar kebutuhan	20%	10%	50	terrealisasi 4 SKPD dari target 8 SKPD
			Persentase Tingkat pemahaman OPD tentang pengelolaan BMD	100%	100%	100	
6	Kasubbag. Perencanaan	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7 Dokumen	7 Dokumen	100	
		Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100	
7	Kasubbag. Keuangan	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	350 Dokumen	100	
8	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100	
		Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	100	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	
		Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	100	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	
		Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	
		Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	100	
		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	100	
		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	
9	Kasubbid Anggaran	Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100	
		Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100	
		Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100	

1	2	3	5	6	7	8	9
		Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100	
		Tersusunnya Perda dan Perbup APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		Tersusunnya Perda dan Perbup APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		Terlaksananya koordinasi dokumen penganggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100	
		Tersedianya SPD yang diterbitkan sesuai ketersediaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84 Dokumen	84 Dokumen	100	
10	Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan	Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran yang akurat	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		Terlaksananya Koordinasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	100	
11	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
		Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trwulanan dan Semesteran	8 Laporan	8 Laporan	100	
		Tersusunnya Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	100	
		Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	100	
12	Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100	
		Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6 Laporan	6 Laporan	100	
		Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
13	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		Tersedianya pemetaan kebutuhan BMD di OPD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Dokumen	41 Dokumen	100	
		Tersusunnya kebijakan pengelolaan BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
14	Kasubbid Inventarisasi	(Penatausahaan Barang Milik Daerah)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	16 Laporan	100	
		Terinventarisirnya BMD yang dimiliki OPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	
		Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8 Laporan	8 Laporan	100	
		Terlaksananya sosialisasi pengelolaan BMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	100	
15	Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Terlaksananya penilaian atas BMD yang ada	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100	
		Terlaksananya monitoring atas penggunaan BMD di OPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100	
16	Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan	Terlaksananya monitoring atas penggunaan BMD di OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100	
		Terlaksananya monitoring atas penggunaan BMD di OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100	

